

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Manusia, hewan dan tumbuhan adalah beberapa contoh ciptaan-Nya. Diantara ciptaan-Nya, manusia adalah makhluk yang paling sempurna dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT yaitu akal dan budi. Dengan akal dan budi yang dimilikinya manusia dapat menentukan mana yang baik dan buruk bagi dirinya. Disamping itu, berdasarkan kodratnya, Allah SWT menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹

Berdasarkan hal tersebut, sudah menjadi hal yang wajar bahwa antara laki-laki dan perempuan ada daya saling tarik menarik. Dari adanya kenyataan tersebut maka akan menimbulkan hubungan antara laki-laki dan

¹ Hasbi Ashshidiqi, et al., 1993, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta : Kathoda.

perempuan untuk hidup bersama dan mempunyai keturunan yaitu dalam ikatan perkawinan.²

Pengertian perkawinan menurut Prof. Subekti, SH dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Perdata” adalah :

*“Pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.”*³

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat menyebabkan putusnya suatu perkawinan adalah kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perkawinan yang berakhir dengan perceraian tentunya akan menimbulkan akibat hukum baik suami/istri, harta benda, maupun anak-anak mereka. Salah satu akibat hukum yang terjadi adalah terhadap anak-anak hasil perkawinan. Pasal 209 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian yaitu apabila :

1. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
2. Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertentangan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴

Hal ini berarti bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. Dalam prakteknya,

² Kamal Mukhtar, 2009, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, hlm. 74.

³ Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa.

⁴ Nadimah Tanjung, 2010, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta, Hlm. 54.

yang paling sering digunakan alasan gugatan perceraian adalah karena adanya perselisihan dan pertentangan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Tuntutan perceraian hanya dapat diajukan oleh pihak yang tidak bersalah dengan alasan seperti tersebut di atas. Maksud pembentuk Undang-Undang yang sebenarnya adalah agar perceraian itu hanya dimungkinkan jika fakta-fakta seperti yang tersebut diatas benar-benar terjadi.⁵

Jadi meskipun undang-undang memperbolehkan adanya perceraian, namun para pihak tetap harus melalui gugatan dan syarat-syarat yang tidak mudah. Bahkan dalam prakteknya, meskipun gugatan perceraian sudah diajukan ke Pengadilan, hakim tetap mengusahakan adanya perdamaian antara suami/istri.

Hal ini disebutkan dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan bahwa :

1. Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap siding pemeriksaan.

Ini membuktikan bahwa negara pun tidak mendukung terjadinya perceraian karena perceraian dianggap sebagai langkah yang kurang

⁵ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen Familie Recht)*, Surabaya : Airlangga University Press Surabaya, Hlm. 137.

bijaksana dan lebih sering mengakibatkan penderitaan baik bagi suami/istri maupun anak-anak mereka. Biasanya penderitaan yang paling berat adalah terhadap anak-anak mereka, apalagi jika anak tersebut masih kecil atau masih di bawah umur. Perceraian dapat mengakibatkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan psikis anak. Selain itu juga perceraian dapat menimbulkan permasalahan lain, misalnya tentang hak asuh anak.⁶

Namun jika ternyata perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dapat diakhiri, maka untuk kebaikan pertumbuhan jiwa anak, perkawinan lebih baik di akhiri dengan cara yakni perceraian. Gugatan atau permohonan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama terdapat 2 (dua) kemungkinan yaitu dikabulkan atau ditolak. Jika ditolak, maka dapat diupaya hukum banding maupun kasasi.⁷

Jika terjadi perceraian yang menyebabkan putusnya perkawinan dan membawa dampak terutama terhadap anak-anak yang lahir sebagai hasil perkawinan, maka terhadap anak-anak tersebut harus tetap dijamin perlindungan hak-hak mereka sebagai seorang anak. Sebagai contoh hak anak seperti yang diatur dalam Asas ke-2 (*Principle 2*) *Declaration On The Right of The Child* (Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa) menyebutkan bahwa :

⁶ Saidus Syahar, 1996, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (ditinjau dari Segi Hukum Islam)*, Bandung, Hlm. 6.

⁷ Notosusanto, 2003, *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta., Hlm. 36.

*The child shall enjoy the special protection, and shall be given opportunities and facilities by law and by other means, to enable him to develop physically, mentally, morally, spiritually, and socially in a healthy and normal manner and in conditions of freedom and dignity. In the enactment of law for this purpose, the best interest of child shall be the paramount consideration.*⁸

Kutipan ayat diatas mempunyai arti “anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani, dan social mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan terbaik untuk anak.

Dalam Asas ke-6 (*Principle 6 Declaration On The Right of The Child*) (Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa) menyebutkan bahwa :

*The child, for full and harmonius development of this personality, needs love and understanding. He shall wherever possible, grow up in the care and under the responsibility of his parents, and in any case, in an atmosphere of affection and of moral arid material security; a child of tender years shall not, save in exceptional circumstances, be separated from his mother. Society and the public authorities shall have the duty to extend particular care to children without a family and to those without adequate means of support. Payment of state and other assistance towards the maintenance of children of large families is desirable.*⁹

Kutipan tersebut mempunyai arti “agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih

⁸ Centre For Human Right Geneva, 1993, *A Compilation of International Instruments (Human Right)*, New York : United Nations Publication, hlm. 172.

⁹ *Ibid.*

satang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak-anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

Terhadap anak-anak yang orangtuanya telah bercerai, maka hak-hak mereka sebagai anak juga harus tetap diperhatikan dan dipenuhi oleh orang tua mereka. Perceraian bukan menyebabkan si anak kehilangan hak-haknya dan juga bukan menjadi penyebab orangtua lepas tangan dari kewajibannya sebagai orangtua.

Terhadap kedua orangtuapun harus menyelesaikan masalah keluarganya setelah memutuskan untuk berpisah atau bercerai, baik masalah harta bersama, hutang bersama, hadhanah maupun nafkan bagi anak serta hak-hak yang harus dipenuhi masing-masing.

Dalam putusan hakim yang diangkat oleh penulis, ditemukan produk hukum yang bertentangan dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim. Hasil putusan tersebut berbeda antara satu dengan yang lain atau terdapat perbedaan yang sangat mencolok sehingga timbul pemikiran

penulis untuk meneliti masalah tersebut. Permasalahan yang timbul mengenai harta bersama, hutang bersama, hadhanah dan nafkah anak serta hak-hak yang harus dipenuhi.

Dari produk hukum yang diangkat oleh penulis, penulis ingin meneliti kembali pertimbangan hakim yang ada dalam putusan tersebut baik dalam perspektif hukum positif dan hukum islam serta dari perspektif asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi tergugat.

Peneliti ingin meninjau sejauh mana putusan yang dijatuhkan di Pengadilan Agama oleh hakim dapat memenuhi 3 (tiga) fungsi hukum yakni asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa haknya dirugikan setelah diputusnya suatu perkara tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik menganalisa putusan Pengadilan Agama tentang hadhanah dan nafkah anak. Sehingga penulis mengambil judul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN HADHANAH DAN NAFKAH ANAK DITINJAU DARI ASAS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM, DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN NOMOR : 0302/Pdt.G/2015/PA.Srog (antara Ana Ismaulana binti Supangat melawan Musliqun Sodiq bin Mujahidin)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah diktum putusan hakim dalam memutus perkara Nomor : 0302/Pdt.G/2015/PA.Srog ditinjau dari perspektif asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor : 0302/Pdt.G/2015/PA.Srog dalam perspektif hukum positif dan hukum islam

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui diktum putusan hakim dalam memutus perkara Nomor : 0302/Pdt.G/2015/PA.Srog ditinjau dari perspektif asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor : 0302/Pdt.G/2015/PA.Srog dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukum keluarga yang menyangkut tentang Hadhanah dan nafkah anak setelah terjadinya perceraian.

b. Sebagai bahan skripsi dan syarat lulus Strata 1, S.Hi di Jurusan Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Agama Islam dan S.H. di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai hukum keluarga yang menyangkut tentang Hadhanah dan nafkah anak setelah terjadinya perceraian.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, sumbangan pemikiran, memperkaya konsep-konsep, teori-teori mengenai ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai

sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.¹⁰

Pendekatan ini memandang hukum sebagai doktrin yang dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan (asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana).

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer, yaitu data-data dan informasi yang diperoleh dari hukum positif yang mengikat/ peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di masyarakat, terdiri dari :

1. Putusan Pengadilan Agama Nomor :0302/Pdt.G/2015/PA.Srog.
2. Al-Qur'an dan Hadits
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer berupa wawancara kepada Hakim, dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah.

¹⁰ Romy Hanitjo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum dan jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.11.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi : Ensiklopedi, Kamus, Glossary.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yakni : Studi Kepustakaan (library research), yakni mengkaji tentang putusan pengadilan, mengkaji dan mempelajari berbagai jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum keluarga yang menyangkut tentang hadhanah dan nafkah anak. Melakukan pencarian atau penelusuran bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan hadhanah dan nafkah anak serta berbagai literatur lainnya. Penelitian kepustakaan ini didukung dengan data dari penelitian lapangan.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa terhadap bahan hukum dalam penelitian hukum yang normatif adalah analisa isi (content analysis) dan dilakukan analisa secara Deskriptif Kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang diperoleh dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, peraturan-peraturan yang berlaku dan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas, sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk dapat memahami dan menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing akan menguraikan tentang :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait topik yang diteliti.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisa secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam BAB II.

BAB IV PENUTUP

Sebagai bab terakhir, maka pada bab ini akan disampaikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan analisa yang telah dirumuskan penulis.